

Kejati DKI Tutup Opsi Restorative Justice untuk Mario Dandy dan Shane

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menutup opsi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas Rotua Pangodan Lumbantoran (19).

Tertutupnya peluang untuk Mario Dandy dan Shane itu lantaran penganiayaan yang dilakukan keduanya menyebabkan korban terluka berat.

"Untuk Tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangodan Lumbantoran tertutup peluang untuk diberikan penghentian penuntutan melalui RJ karena menyebabkan akibat langsung korban sampai saat ini tidak sadar/luka berat, sehingga ancaman hukumannya lebih dari batas maksimal RJ, dan menjadikan penuntut umum untuk memberikan hukuman yang berat atas perbuatan yang sangat keji," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Ade Sofyansah melalui keterangan tertulis, Jumat (17/3).

Ade mengatakan, *restorative justice* hanya bisa dilakukan jika ada pemberian maaf dari keluarga korban. Jika tidak ada, alternatif penyelesaian perkara tersebut tidak bisa diterapkan.

"*Restorative justice* hanya dapat dilaksanakan apabila ada pemberian maaf oleh korban atau keluarga. Jika tidak ada, otomatis tidak ada upaya *restorative justice* dalam tahap penuntutan," ujar Ade.

Sementara itu, terkait pernyataan Kajati DKI Jakarta Reda Manthovani yang menawarkan penerap-

an diversifikasi terhadap anak AG yang berkonflik dengan hukum, Ade menjelaskan hal itu semata-mata mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sebab, lanjut dia, Anak AG tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban.

Sebagai informasi, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

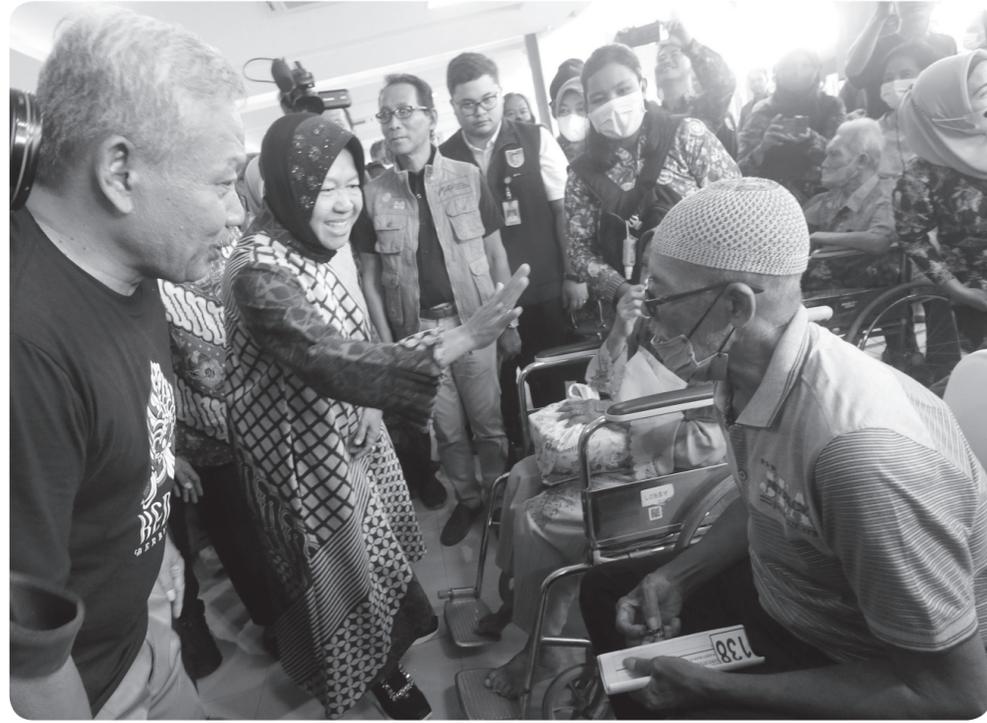
"Statement Kajati DKI Jakarta memberikan peluang untuk menawarkan memberikan diversifikasi kepada Anak AG yang berkonflik dengan hukum semata-mata hanya mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, oleh karena perbuatan yang bersangkutan tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Namun, apabila korban dan keluarga tidak memberikan upaya damai khusus terhadap pelaku Anak AG yang berkonflik dengan hukum, upaya *restorative justice* tidak akan dilakukan," tutur Ade.

Ade juga menjelaskan alasan Kajati DKI dan tim jaksa penuntut umum menjenguk David di rumah sakit semata-mata sebagai ungkapan rasa empati. Juga sekaligus untuk memastikan perbuatan para terdakwa layak diberi hukuman yang berat.

"Kehadiran Kajati DKI Jakarta dan tim penuntut umum di rumah sakit semata-mata ungkapan rasa empati sebagai penegak hukum sekaligus memastikan bahwa perbuatan para terdakwa sangat layak untuk diberi hukuman yang berat," katanya. ● osm

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KUNJUNGAN KERJA MENSOS DI KEDIRI

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) menyapa pasien saat kunjungan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Simpan Lima Gumul (RSUD SLG) di Kediri, Jawa Timur, Jumat (17/3). Kegiatan mensos tersebut guna meninjau secara langsung bakti sosial dan operasi katarak gratis.

BNPT: Tiap Unsur Masyarakat Penting Cegah Terorisme

Komjen Pol. Boy Rafli Amar berharap kepada lembaga pendidikan untuk mampu menanamkan pemahaman sejak dini bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat pun harus menjadi teladan toleransi. "Sementara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melakukan penguatan regulasi," katanya.

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar menegaskan bahwa setiap unsur masyarakat memiliki peran penting di dalam mencegah

aksi terorisme. "Kita menyertakan seluruh elemen masyarakat, sehingga seluruh elemen dapat ikut menyebarkan pemahaman-pemahaman yang baik," kata Boy dalam keterangan

yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (17/3).

Dengan tingginya kesadaran bahwa ancaman terorisme merupakan ancaman yang berbahaya, Boy berharap seluruh lapisan masyarakat memiliki imunitas terhadap virus radikalisme. "Harapannya, masyarakat tidak mudah terpengaruh ideologi yang berbasis kebencian dan semangat permusuhan," tambahnya.

Dia juga berharap kepada lembaga pendidikan untuk mampu menanamkan pemahaman sejak dini bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat pun harus menjadi teladan toleransi. "Sementara eksekutif,

legislatif, dan yudikatif harus melakukan penguatan regulasi," katanya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT memiliki tugas untuk mengoordinasikan penanggulangan terorisme termasuk dengan cara membangun kesiapsiagaan nasional akan ancaman terorisme.

Ia menyampaikan pesan tersebut dalam dialog bertajuk "Meningkatkan Peran Serta Seluruh Elemen Masyarakat dalam Antisipasi Radikal Terorisme".

Acara Kesiapsiagaan Nasional di Kota Bandung, Jawa Barat, itu melibatkan sekitar 200 orang masyarakat yang terdiri atas beragam unsur, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, anggota Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Barat,

hingga perwakilan mahasiswa. "Terorisme masih menjadi ancaman yang serius dan nyata bagi masyarakat di berbagai daerah," ujar Boy.

Sebelumnya, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) R. Ahmad Nurwahid mengajak para mitra deradikalisasi untuk kembali menjunjung komitmen kebangsaan Indonesia.

"Apa itu komitmen kebangsaan? Pertama, berpedoman pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD NRI 1945. Kedua adalah toleransi. Jangan merasa paling benar dalam beragama, harus menghormati sesama. Ketiga, mengakomodasi kebudayaan dan kearifan lokal. Terakhir, anti-kekerasan," ujar Nurwahid, Kamis (16/3). ● dot



FOTO: ANI

PEMERIKSAAN LANJUTAN ABDUL LATIF AMIN IMRON

Bupati Bangkalan (nonaktif) R Abdul Latif Amin Imron selaku tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/3).

Kasad Terima Delegasi Kontingen Garuda UNIFIL Tahun 2022

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman menerima delegasi Kontingen Garuda United Nation Interim Force in Lebanon (UNIFIL) Tahun 2022.

Dikutip dari keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), diterima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/3), delegasi Kontingen Garuda UNIFIL Tahun 2022 baru saja selesai melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB di Libanon Selatan selama satu tahun, dihitung sejak 24 Februari 2022 sampai 7 Maret 2023.

Selain mengucapkan selamat datang kembali ke Tanah Air, Dudung juga menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas pengabdian Kontingen Garuda UNIFIL tahun 2022 yang telah mengharumkan nama Indonesia.

Selanjutnya, Dudung berharap agar penugasan yang telah dilaksanakan Kontingen Garuda UNIFIL dapat memberikan pengalaman baru dalam melanjutkan kedinasan dan kemajuan TNI AD pada masa mendatang.

Kontingen Garuda UNIFIL Tahun 2022 berjumlah 1.088 prajurit TNI gabungan dengan main body Batalyon

Infanteri 731/Kabaresi. Kontingen Garuda melaksanakan tugas pemantauan terhadap pelaksanaan aktivitas di daerah perbatasan antara Libanon Selatan dan Israel, atau yang disebut dengan blue line.

Selain menjaga perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai, Satgas Yonmek Indobatt juga melaksanakan tugas teritorial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar.

Delegasi Kontingen Garuda UNIFIL terdiri atas Komandan Kontingen Garuda UNIFIL Kolonel Inf Fikri Ferdian dan para Dansatgas Kontingen Garuda UNIFIL, di antaranya Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) FHQSU Kolonel Arh Andre Wira, DCO Sector East Kolonel Inf Is Abdul Rasi.

Lebih lanjut, juga terdapat Dansatgas MPU Letkol Cpm Loedwik Malau, Dansatgas FPC Letkol Inf Ginanjar Wayutomo, Dansatgas MCOU Mayor Inf Afrizal Rakhman, Dansatgas CIMIC Mayor Kav Nico Hermawan, dan Satgas Hospital Level II Kapten CKM dr Yoyok Nike. Mereka diterima langsung oleh Dudung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (16/3). ● hen

Kemenkumham Sorot Pencurian dan Narkoba Terkait Perilaku Kriminal Anak

JAKARTA (IM) - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyoroti berbagai jenis tindak kejahatan dan perilaku kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku atau Anak Berhadapan dengan Hukum.

"Tiga kategori kasus teratas yang ditangani BPHN lewat program bantuan hukum gratis meliputi kasus pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan kasus lain semacam perundungan atau bullying," kata Kepala BPHN Kemenkumham Widodo Ekajahjana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/3).

Dikutip dari Antara, dari 2.302 kasus anak sebagai pelaku, sebanyak 838 kasus atau 36 persen di antaranya merupakan kejahatan pencurian, sedangkan 341

atau 15 persen di antaranya merupakan penyalahgunaan narkoba, serta 232 atau 10 persen lainnya merupakan penganiayaan.

Selanjutnya, tercatat sebanyak 153 kasus merupakan perilaku kriminal anak yang melibatkan senjata tajam atau bahan peledak, 173 kasus merupakan pencabulan atau pelecehan, 48 kasus merupakan pembunuhan, 26 kasus merupakan pemerkosaan, dan 491 kasus meliputi pornografi, penipuan, pengancaman dengan kekerasan, dan lain-lain.

"Kami tidak bisa bergerak di hilir dan mesti mengoptimalkan pencegahan dengan memberikan pembekalan secara langsung kepada anak-anak di sekolah," ucap Widodo.

Dia mengatakan BPHN memiliki kewenangan memberikan pembekalan dan

pembinaan hukum secara langsung kepada siswa-siswi sekolah.

Melalui peran dari pejabat fungsional penyuluh hukum, siswa-siswi sekolah mendapat pemahaman seputar tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus penjelasan mengenai tanggung jawab anak dalam hal mereka terlibat kasus sebagai pelaku anak.

Dia berharap agar program bertajuk "BPHN Mengasuh" digelar secara serentak dan terpadu pada 20 Maret sampai 14 April. Widodo akan membuka secara langsung kick off program tersebut. "Lima ratus dua puluh tujuh pejabat fungsional penyuluh hukum, 6.208 advokat, dan 5.744 paralegal akan berkolaborasi dalam program BPHN Mengasuh," ujarnya. ● osm



FOTO: ANI

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

Pembeli memilih pakaian impor bekas yang dijual di Pasar Higienis, Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (17/3). Presiden Joko Widodo mendukung larangan impor pakaian bekas atau thrifting karena sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri yang berdampak bagi ekonomi domestik.

Wakil Ketua MPR Dorong Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya dukungan dari semua pihak demi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Menurutnya, hal ini penting untuk mewujudkan proses pembangunan yang lebih baik.

"Merealisasikan lebih banyak partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik harus konsisten diupayakan demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik," kata Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya, Jumat (17/3).

Rerie memaparkan Riset State of The World's Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan Indonesia awal tahun ini mencatat 9 dari 10 perempuan percaya partisipasi politik itu penting. Namun, mereka juga mengakui adanya berbagai hambatan dalam proses partisipasi tersebut.

Adapun hambatan yang dimaksud bersifat interseksional dan struktural, karena usia dan gender yang dianggap belum dewasa. Selain itu, ada juga stereotip yang berkembang di masyarakat.

Rerie menyebut tantangan lain yang juga cukup beragam. Dari kurangnya akses ke dalam pengambilan keputusan, persepsi kurangnya pengetahuan atau keterampilan, hingga gagasan dari orang lain tentang apa yang pantas untuk remaja perempuan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Persentase keterwakilan perempuan tersebut masih di bawah angka persyaratan 30% jumlah

calon legislatif perempuan pada saat parpol mendaftar menjadi peserta pemilu.

Menurut Rerie, kompleksnya tantangan yang dihadapi membuat upaya melibatkan perempuan dalam proses politik membutuhkan dukungan dari banyak pihak dan strategi yang tepat. Ia menilai tidak mudah mengikis anggapan atau persepsi masyarakat yang berkembang terkait bagaimana seharusnya perempuan berkegiatan di masyarakat.

Oleh karena itu, anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini berharap peningkatan kualitas pendidikan nasional dapat mendorong perempuan untuk berkiprah di luar sektor domestik. Salah satunya di bidang politik.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini pun menilai sosialisasi masif terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik harus konsisten dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di lingkungan masyarakat.

Dengan adanya dukungan dan sosialisasi, Rerie berharap sikap perempuan yang menilai bahwa politik itu penting dapat terus didorong. Sehingga mampu meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik di Tanah Air. ● osm

PEMBERITAHUAN HASIL Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. LIGHTREES ERA INDONESIA Dengan ini diberitahukan kepada para kreditur PT. LIGHTREES ERA INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat, pada tanggal 17 Maret 2023, telah dilakukan RUPS-LB dengan keputusan sebagai berikut: - Pengurangan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) - Akan dilakukan juga perubahan pemegang saham pendiri. Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta, 18 Maret 2023. Direktur PT. LIGHTREES ERA INDONESIA